PENERAPAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR)* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Ria Nur Rizqiah dan Ahmad Tarmizi Lubis

Program Studi Akuntansi Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
Email: riarizqiah@gmail.com

ABSTRACT

Along with the rapid development of internet technology today, the company's financial reporting activities can be done via the Internet in real time in an easy way and a wider scope. Internet-based financial reporting is commonly known as the Internet Financial Reporting (IFR). This research is a descriptive study that aims to determine the implementation of IFR on Islamic Banks in Indonesia. The variables in this study consisted of content, presentation and timeliness variable with a total of 112 items tested indicators. The results of this study indicate that the eleventh BUS sampled research has been able to apply IFR. IFR score obtained by each BUS has a nearly equal value ranging from 49% to 63% with the total maximum score of 100% and average score of 55%.

Keywords: Internet Financial Reporting (IFR), disclosure, Islamic Banks

1. PENDAHULUAN

Pada era modern seperti sekarang ini, banyak hal yang dapat dilakukan dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi dunia yang menyediakan berbagai fitur menarik di dalamnya. Fitur internet merupakan salah satu yang sering digunakan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari sehingga kehadirannya pun telah menjadi sahabat bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Internet World Stats*(2015), Asia menempati urutan teratas dalam penggunaan internet di dunia. Dalam hal ini, Asia mengambil porsi yang cukup besar dengan nilai persentase sebesar 48.2% dengan perbedaan yang cukup jauh dengan posisi kedua yang ditempati oleh Eropa dengan persentase sebesar 18%. Di Indonesia, jumlah pengguna internet per 15 November 2015 adalah sebesar 78 juta jiwa atau setara dengan 4,8% dari total pengguna internet di kawasan Asia.

Keberadaan internet pada era globalisasi saat ini sangatlah bermanfaat bagi berbagai kalangan masyarakat. Menurut Ashbaugh et al. (1999) dan Debrecey et al. (2002) dalam Narsa & Pratiwi (2014), internet dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi yang penting karena memiliki berbagai keunggulan seperti mudah menyebar (*pervasiveness*), tidak mengenal batas (*borderless-ness*), *real-time*, berbiaya rendah (*low cost*), dan mempunyai interaksi yang tinggi (*high interaction*) serta diintegrasikan dengan teks, angka, gambar, animasi, video, dan suara. Bagi pihak perusahaan, hal ini dapat dijadikan sebagai keuntungan tersendiri, karena

internet dapat dimanfaatkan sebagai media dalam menyediakan informasi kepada *stakeholder* mengenai gambaran kondisi perusahaan, informasi keuangan dan lain sebagainya melalui *website* perusahaan. Dengan begitu, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya secara global dan *real-time* dimanapun mereka berada tanpa harus menunggu atau menghubungi pihak perusahaan.

Pengungkapan informasi keuangan melalui *website* ini biasa disebut dengan istilah *Internet Financial Reporting (IFR)*. IFR merupakan salah satu contoh pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), hal ini bukan dikarenakan oleh konten pengungkapannya, akan tetapi lebih kepada alat yang digunakan (Purba, Medyawati, Silfianti, & Hermana, 2013). Menurut Mooduto(2013), IFR adalah suatu mekanisme pengungkapan laporan keuangan perusahaan melalui internet atau melalui situs web yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang diklasifikasikan melaksanakan IFR adalah perusahaan yang melaporkan informasi keuangan, laporan keuangan interim, dan/atau laporan tahunan lengkap melalui *website* perusahaan (Khan & Ismail, 2011).

Pengungkapan informasi keuangan melalui *website* perusahaan dapat mengurangi terjadinya ketimpangan informasi antara pihak perusahaan dengan para investor maupun kreditor. Selain itu, dengan dilakukannya IFR maka pihak perusahaan dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki lingkup tanggung jawab yang luas. Perusahaan harus membuat berbagai keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam perusahaan (tidak hanya penuntut keuangan, tetapi juga karyawan, pelanggan, masyarakat dan pejabat pemerintah) (Jensen, 2001). Hal ini dikarenakan kegiatan dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Melalui *website* perusahaan, maka pihak manapun akan dapat mengetahui dengan mudah mengenai informasi yang tercantum di dalamnya. Para investor dan kreditor dapat terbantu dalam membuat keputusan investasi dan keputusan bisnis lainnya dengan sistem pelaporan yang fleksibel dan memungkinkan mereka memperoleh informasi dengan cara yang lebih mudah, cepat dan berbiaya rendah. Hal ini dikarenakan internet menyediakan bentuk unik dari pengungkapan sukarela yang memungkinkan perusahaan memberikan informasi secara global sesegera mungkin (Abdelsalam, 2007) dalam (Khan & Ismail, 2012).

Dengan dilakukannya IFR di suatu entitas usaha yakni pencantuman informasi keuangan perusahaan melalui internet pada *website* resmi perusahaan, maka hal ini mendukung internet menjadi sarana utama pelaporan keuangan serta perpindahan periode *paper-based reporting system* menjadi *paper-less reporting system* (Hanifa & Rashid, 2005). Perubahan tersebut juga merupakan suatu langkah baik karena dapat memudahkan penggunaannya serta dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

Penerapan IFR juga telah menarik perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi jalannya sektor jasa keuangan pada perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia. OJK dalam “*Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia (2014)*” telah merekomendasikan untuk mewajibkan perusahaan publik dalam mengungkapkan informasi material tertentu melalui situs web perusahaan, karena Pedoman Umum *Good Corporate Governace (GCG)* di Indonesia saat ini belum mewajibkan atau mendorong perusahaan untuk mengungkapkannya. Namun demikian, BAPEPAM-LK selaku pengatur pasar modal sebelumnya telah mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki situs web dan menyediakan beberapa informasi secara terbatas. Oleh karena itu, saat ini OJK telah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang dengan begitu menandakan adanya keseriusan OJK dalam mengatur penerapan IFR di Indonesia walaupun peraturan tersebut masih berupa *draft* dan hanya dikhususkan kepada perusahaan publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi seperti dalam uraian di atas, maka bank syariah pun tidak dapat mengabaikan kemajuan tersebut. *Internet Financial Reporting (IFR)* yang merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi sebagai media penyampaian informasi seharusnya juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri perbankan mengingat banyaknya manfaat yang ditawarkan dari penerapan IFR itu sendiri. Terlebih lagi dikarenakan peran perbankan yang sangat penting bagi masyarakat. Sebagai media intermediasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka terdapat kewajiban bagi pihak bank untuk dapat melakukan transparansi mengenai perkembangan usahanya kepada masyarakat luas. Hal ini berlaku pula bagi industri perbankan syariah. Kewajiban mengenai transparansi tersebut terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa perbankan syariah wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* sebagai upaya pemenuhan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* itu sendiri yaitu transparansi atau keterbukaan.

Selain memandang Peraturan Bank Indonesia (PBI) di atas, industri perbankan syariah sendiri bahkan memiliki tanggung jawab lebih dalam melakukan prinsip transparansi. Sebagai lembaga keuangan syariah, maka perbankan syariah juga dituntut untuk memenuhi kepatuhan syariah dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Hal ini terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dengan demikian, maka akan lebih banyak lagi pokok-pokok nilai yang harus diungkapkan dalam melakukan transparansi tersebut. Selanjutnya, apabila tingkat atau derajat transparansi ini mencapai tingkat yang tinggi, maka *stakeholder* terutama investor akan

mendapat informasi yang lebih relevan, tepat waktu, bahkan lebih awal mengenai perusahaan. Jika demikian, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan investor mengenai prospek perusahaan di masa mendatang (Narsa & Pratiwi, 2014).

Dengan diterapkannya IFR ini pada suatu entitas perusahaan seperti perbankan syariah, maka hal tersebut juga dapat memberikan keuntungan lain bagi pihak perusahaan itu sendiri yakni dalam kaitannya dengan *signaling theory* (teori sinyal). Menurut Wolk (2001) dalam Narsa & Pratiwi (2014), teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan harus memanfaatkan informasi laporan keuangan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada pihak eksternal. Dorongan untuk mengungkapkan informasi ini muncul sebagai salah satu cara untuk mengatasi asimetri informasi antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal karena perusahaan memiliki informasi lebih banyak mengenai apa yang sudah dilakukan perusahaan dan prospek perusahaan daripada pihak eksternal. Hal ini tentu saja menjadi hal yang positif bagi perusahaan terlebih bagi perbankan syariah yang telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO), karena investor akan selalu membutuhkan informasi yang simetris dalam membuat keputusan investasi. Selain itu, harga saham perusahaan yang melaksanakan IFR akan bergerak lebih cepat dibandingkan perusahaan non-IFR. Semakin tinggi transparansi informasi yang dilakukan, maka dapat menghasilkan *abnormal return* yang lebih tinggi pula pada harga saham perusahaan (Lai, Lin, Li, & Wu, 2010).

Selain sebagai industri syariah yang paling populer di masyarakat, perbankan syariah juga merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari total aset perbankan syariah dalam Statistik Perbankan Syariah per Juni 2015 yakni sebesar Rp 272.38 triliun yang jauh lebih besar dibandingkan industri syariah lainnya seperti asuransi dan pembiayaan syariah yang hanya berkisar Rp 20 triliun. Oleh karena itu, bank syariah tidak boleh terlepas dari perkembangan teknologi yang ada. Karena dengan diterapkannya IFR secara optimal, maka diharapkan dapat membantu sektor perbankan syariah dalam mengembangkan diri untuk terus meningkatkan *market share*-nya.

Walaupun praktik IFR menawarkan banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila menerapkannya dan telah berkembang pesat pada saat ini, masih banyak perusahaan yang tidak menerapkannya (Purba, Medyawati, Silfianti, & Hermana, 2013). Masalah lainnya juga terdapat pada entitas yang sudah melaksanakan IFR. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Almilia (2009) mengenai komparasi indeks IFR pada *website* perusahaan terbuka di Indonesia yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan belum memanfaatkan secara optimal sarana yang disediakan dalam *website*, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut termasuk industri perbankan yang merupakan industri dengan regulasi yang ketat. Temuan lain dalam penelitian tersebut juga menyatakan banyak perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, karena kebanyakan informasi yang

disajikan dalam *website* perusahaan adalah tentang produk atau jasa yang dihasilkan serta banyak sekali perusahaan yang tidak meng-*update* informasi-informasi yang disajikan.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Khan & Ismail (2011) dalam mengukur tingkat IFR perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat IFR emiten Bursa Malaysia berkisar dari 48,27% hingga 78,16%. Selain itu, Elhelaly & Mohamed (2014) turut melakukan penelitian mengenai penerapan IFR pada perusahaan-perusahaan di Mesir. Hasil penelitian menyatakan dari 100 perusahaan yang terdaftar diindeks EGX100 di Bursa Efek Mesir yang dianalisis, hanya 36 perusahaan yang menggunakan *website* dan hanya 29 perusahaan memberikan informasi keuangan di situs web mereka. Penelitian ini mengungkapkan terbatasnya penggunaan internet untuk tujuan pelaporan keuangan di Mesir. Tampak bahwa meskipun penggunaan internet sebagai media untuk penyebaran informasi perusahaan di berbagai wilayah dan Negara di dunia telah meningkat, masih banyak perusahaan yang tidak memiliki *website* perusahaan atau tidak menggunakan situs web mereka untuk menyebarkan informasi keuangan tersebut.

Di Indonesia sendiri telah terdapat banyak penelitian mengenai penerapan IFR, namun sebagian besar di antaranya adalah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan IFR tersebut pada suatu entitas perusahaan. Walaupun terdapat penelitian mengenai pengukuran skor IFR di suatu perusahaan, obyek penelitian tersebut sering kali menggunakan perusahaan publik dan hal-hal yang diukur di dalamnya adalah berupa konten umum pengungkapan informasi keuangan. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis untuk mengukur penerapan IFR pada BUS di Indonesia dengan menyertakan pengukuran pengamatan mengenai nilai-nilai syariah di dalamnya.

Penelitian mengenai penerapan IFR pada perbankan syariah sebenarnya telah dilakukan oleh Lestari (2014). Lestari melakukan analisis jumlah pengungkapan sukarela laporan keuangan tahunan perbankan syariah melalui *website* dengan hasil skor IFR bank syariah paling banyak jumlahnya pada skor 40%-49% dan yang tertinggi pada skor 50%-59% dari total skor keseluruhan skor 100%. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa sampai saat ini bank syariah belum memaksimalkan penggunaan IFR dalam mengungkapkan informasi keuangan kepada para *stakeholder*.

2. TELAAH TEORITIS

2.1 TEORI SINYAL (SIGNALING THEORY)

Dalam Shehata (2014) disebutkan bahwa meskipun teori sinyal pada awalnya dikembangkan untuk mengklarifikasi asimetri informasi di pasar tenaga kerja (Spence, 1973), namun teori ini telah digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sukarela dalam pelaporan perusahaan (Ross, 1977). Jogiyanto (2000) dalam Widaryanti (2011) mengemukakan bahwa teori sinyal

(signalling theory) membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agent) disampaikan kepada pemilik modal (principles). Wolk et al. (2000) dalam Sari & Zuhrotun (2006) mengungkapkan bahwa sinyal yang diungkapkan perusahaan nantinya akan mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan. Informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan.

Signalling theory dapat digunakan untuk memprediksi kualitas pengungkapan perusahaan, yaitu dengan penggunaan internet sebagai media pengungkapan perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan (Almilia, 2008). *Signaling theory* digunakan sebagai dasar menguji kandungan informasi dalam peristiwa pengungkapan IFR. *Signaling theory* mengemukakan tentang cara perusahaan memberikan sinyal kepada investor. Sinyal ini berupa informasi tentang kinerja perusahaan, baik informasi keuangan maupun nonkeuangan dalam pengungkapan IFR (Mooduto, 2013).

2.2 PENGUNGKAPAN

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Sedangkan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dari suatu proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Pengungkapan sering pula dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal (Suwardjono, 2005). Menurut Hendriksen (2002) dalam Hardiningsih (2008) terdapat tiga konsep pengungkapan yang umum diusulkan, yaitu:

1. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup), yaitu konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar), yaitu pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. *Full disclosure* (pengungkapan penuh), yaitu pengungkapan yang menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan.

2.3 INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR)

Keberadaan internet telah mengakibatkan evolusi pelaporan keuangan dari desain konvensional dalam bentuk laporan tahunan cetak menjadi pelaporan keuangan kontemporer berbasis internet (Lipunga, 2014). Pelaporan berbasis internet ini biasa disebut dengan istilah *Internet Financial Reporting (IFR)* atau *Corporate Internet Reporting (CIR)*. Menurut Mooduto (2013), *Internet Financial Reporting (IFR)* adalah suatu mekanisme pengungkapan laporan

keuangan perusahaan melalui internet atau melalui situs web yang dimiliki oleh perusahaan.

Penelitian mengenai IFR mulai dilakukan pada tahun 1996 dan 1997 (Petravick & Gillett, 1996; Louwers *et al.* 1996; Lymer (1997); Flynn & Gowthorpe, 1997; Gray & Debreceeny, 1997), hanya selisih satu tahun setelah keberadaan internet mulai dijadikan sebagai media iklan oleh perusahaan (Allam & Lymer, 2003). Untuk mengetahui diterapkan atau tidaknya IFR pada suatu perusahaan, terdapat beberapa klasifikasi yang ditentukan oleh para peneliti terdahulu. Menurut Chan & Wickramasinghe (2006), perusahaan yang melakukan praktik IFR adalah perusahaan yang mengungkapkan satu set lengkap laporan keuangan termasuk catatan kaki dan laporan auditor, atau link menuju dokumen laporan tahunannya di suatu tempat dalam internet. Sedangkan menurut Khan & Ismail(2011), kriteria perusahaan yang melakukan IFR adalah perusahaan yang melaporkan baik informasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan/atau laporan tahunan komprehensif pada *website* perusahaan.

Dalam menerapkan IFR, setiap perusahaan biasanya memiliki alasannya tersendiri. *Financial Accounting Standards Board* (FASB) menyebutkan beberapa motif yang melatarbelakangi dilakukannya pelaporan keuangan melalui *website* pada suatu perusahaan, yaitu:

1. Mengurangi biaya dan waktu untuk mendistribusikan informasi
2. Berkomunikasi dengan pengguna informasi yang tak dikenal
3. Melengkapi praktik pengungkapan informasi yang biasa dilakukan dengan format cetak (tradisional)
4. Meningkatkan jumlah dan jenis data yang diungkapkan
5. Meningkatkan akses kepada investor potensial bagi perusahaan kecil

International Accounting Standards Committee (IASC) membagi cara penggunaan internet sebagai media penyajian laporan keuangan perusahaan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Perusahaan menyajikan laporan berupa duplikasi dari laporan keuangan yang dicetak dalam bentuk *electronic paper* (contoh: *adobe acrobat(pdf)*)
2. Mengubah format laporan keuangan dalam bentuk *Hypertext Mark-Up Language* (HTML)
3. Memaksimalkan penggunaan web sehingga terdapat perangkat tambahan yang dapat menyajikan informasi lebih lengkap dan kompleks dari laporan keuangan tradisional.

IFR sebagai salah satu media pengungkapan turut menawarkan berbagai keuntungan baik bagi pihak internal perusahaan selaku penyedia maupun pihak pengguna seperti investor, pelanggan, dll. Keuntungan tersebut di antaranya (Khan *et al.* 2013; Umoren & Asogwa, 2013; Ojah & Mokoaleli-Mokoteli, 2012; Pervan, 2006):

1. Mempromosikan perusahaan kepada masyarakat umum sehingga mampu menarik investor lokal maupun asing.
2. Menyediakan cakupan/lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan bentuk tradisional laporan keuangan serta memungkinkan tersedianya format laporan yang cocok untuk perhitungan.
3. Meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi keuangan untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan transparansi pelaporan keuangan perusahaan.
5. Menyediakan informasi perusahaan secara *real time* dan dapat diperbarui secara terus menerus dengan biaya yang relatif lebih rendah daripada laporan berbasis kertas.
6. Menyediakan perangkat seperti *hyperlink*, mesin pencari, multimedia dan keterkaitan (*interlinkage*) antar dokumen untuk mendukung tampilan pengungkapan.
7. Memungkinkan untuk mencari, menyaring, mengunduh, mendapatkan kembali dan bahkan mengkonfigurasi ulang informasi tersebut dengan biaya rendah dalam waktu singkat.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Variabel yang digunakan untuk menilai pengungkapan melalui praktik IFR pada penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu variabel isi (*content*) dan tampilan (*presentation*) dan ketepatanwaktuan (*timeliness*). Variabel ini merupakan modifikasi dan penggabungan dari beberapa variabel yang biasa digunakan untuk penelitian IFR. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Item Indikator Pengungkapan IFR

Variabel	Item yang diungkapkan pada <i>website</i> BUS
Isi (<i>content</i>) OJK, 2015; (b) Khan & Ismail, 2011	1 Laporan posisi keuangan tahun berjalan (a)
	2 Laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan (a)
	3 Laporan perubahan ekuitas tahun berjalan (a)
	4 Laporan arus kas tahun berjalan (a)
	5 Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan (a)
	6 Laporan komitmen dan kontigensi tahun berjalan (a)
	7 Perhitungan KPMM tahun berjalan (a)
	8 Jumlah & kualitas aset produktif serta CKPN tahun berjalan (a)
	9 Rasio keuangan bank tahun berjalan (a)

10	Transaksi spot dan transaksi derivatif tahun berjalan (a)
11	Laporan distribusi bagi hasil tahun berjalan (a)
12	Laporan sumber dan penyaluran dana zakat tahun berjalan (a)
13	Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tahun berjalan (a)
14	Laporan perubahan dana investasi terikat tahun berjalan (a)
15	Laporan bulanan tahun berjalan (a)
16	Laporan triwulanan tahun berjalan (a)
17	Laporan semesteran tahun berjalan (b)
18	Laporan tahunan tahun berjalan(a)
19	Laporan posisi keuangan tahun lalu (a)
20	Laporan laba rugi komprehensif tahun lalu (a)
21	Laporan perubahan ekuitas tahun lalu (a)
22	Laporan arus kas tahun lalu (a)
23	Catatan atas laporan keuangan tahun lalu (a)
24	Laporan komitmen dan kontigensi tahun lalu (a)
25	Perhitungan KPMM tahun lalu (a)
26	Jumlah dan kualitas aset produktif serta CKPN tahun lalu (a)
27	Rasio keuangan bank tahun lalu (a)
28	Transaksi spot dan transaksi derivatif tahun lalu (a)
29	Laporan distribusi bagi hasil tahun lalu (a)
30	Laporan sumber dan penyaluran dana zakat tahun lalu (a)
31	Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tahun lalu (a)
32	Laporan perubahan dana investasi terikat tahun lalu (a)
33	Laporan bulanan tahun lalu (a)
34	Laporan triwulanan tahun lalu (a)
35	Laporan semesteran tahun lalu (b)
36	Laporan tahunan tahun lalu(a)
37	Laporan auditor tahun berjalan (b)
38	Laporan auditor tahun lalu (b)
39	Laporan keuangan berbahasa Inggris (b)
40	Laporan setiap bagian lini bisnis tahun berjalan (b)
41	Laporan setiap bagian lini bisnis tahun lalu (b)
42	Laporan setiap bagian wilayah tahun berjalan (b)
43	Laporan setiap bagian wilayah tahun lalu (b)
44	Laporan/analisis manajemen tahun berjalan (b)
45	Basis standar laporan keuangan tahun berjalan (b)
46	Tambahan atau amandemen laporan tahunan berjalan (b)
47	Laporan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> (b)
48	Ringkasan laporan tahunan tahun berjalan (b)
49	Halaman web berbahasa Inggris (b)
50	Kebijakan akuntansi (b)
51	Informasi deviden (b)

	51	Analisis risiko utama perusahaan (b)
	53	Informasi perusahaan (b)
	54	Laporan direksi (b)
	55	Anggota direksi (b)
	56	Ringkasan data keuangan (min. 5 thn terakhir/menyesuaikan thn berdiri) (b)
	57	10 pemegang saham tertinggi tahun berjalan (b)
	58	Ringkasan rasio utama (min. 5 thn terakhir/menyesuaikan thn berdiri) (b)
	59	Jalan singkat mencari informasi keuangan (b)
	60	Tanda tangan auditor pada laporan tahun lalu (b)
	61	Piagam komite audit (b)
	62	Penghargaan yang diterima pada tahun berjalan (b)
	63	Informasi pemegang saham (b)
	64	Alamat perusahaan (b)
	65	Informasi strategi perusahaan (b)
	66	Informasi tahun berjalan dapat dibedakan dengan tahun lalu (b)
	67	Informasi kepemilikan saham direksi (b)
	68	<i>Disclaimer</i> /sangkalan (b)
	69	Tanda tangan CEO dalam laporan (b)
	70	Penjualan produk utama (b)
	71	Informasi rapat umum tahunan (b)
	72	Informasi rencana reinvestasi deviden (b)
	73	Kode etik dan etika bagi direksi, petugas dan karyawan (b)
	74	Indikator untuk menemukan informasi terkini secara cepat (b)
	75	Informasi manager (min. identitas dan CV eksekutif) (b)
	76	Informasi proyeksi (b)
	77	Informasi modal intelektual (b)
	78	Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun berjalan (b)
	79	Riwayat harga saham (b)
	80	Siaran pers/berita terkini (b)
	81	Prinsip/pedoman perusahaan (b)
Tampilan (<i>presentation</i>) (Khan & Ismail, 2011)	1	Waktu memuat <i>website</i> dibawah 10 detik
	2	Laporan tahunan dalam format pdf
	3	<i>Hyperlink</i> analis keuangan
	4	<i>Hyperlink</i> dalam laporan tahunan
	5	Link menuju <i>homepage</i>
	6	Link menuju <i>top homepage</i>
	7	Kemampuan mengunduh laporan
	8	Link menuju situs peta/ <i>sitemap</i>
	9	Kontak email langsung (umpan balik) yang tersedia
	10	Data keuangan dalam format <i>processable</i> (contoh: <i>excel</i>)
	11	Penggunaan teknologi multimedia

Ketepatanwaktuan (<i>timeliness</i>) (Abdelsalam & El-Masry, 2008)	12	Situs peta/ <i>sitemap</i>
	13	Teks <i>hyperlink</i>
	14	<i>Hyperlink</i> data pada sebuah situs web pihak ketiga
	15	Memungkinkan mengubah format
	16	Format laporan dapat digunakan untuk perhitungan
	17	Mesin pencari (<i>search engine</i>) internal
	18	Batasan jelas untuk laporan tahunan
	19	Laporan tahunan dalam format html
	20	Menu <i>pull-down</i>
	1	Tanggal terakhir pembaharuan <i>website</i>
	2	Tahun terakhir pembaharuan <i>website</i>
	3	Harga saham terbaru (saat ini)
	4	Waktu pembaharuan khusus untuk data harga saham
	5	Frekuensi pembaharuan laporan keuangan
	6	Kalender kegiatan keuangan pada masa depan
	7	Opsi pendaftaran email untuk pemberitahuan berita/siaran terkini, dll
	8	Informasi mengenai waktu untuk mendapat respon pertanyaan melalui email dan pertanyaan <i>online</i>
	9	<i>Webcast</i> (siaran melalui <i>website</i>)
	10	Salinan berita peraturan terbaru
	11	Laporan keuangan interim terbaru

Sumber: (Khan & Ismail, 2011; Otoritas Jasa Keuangan, 2015; Abdelsalam & El-Masry, 2008)

Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang tercatat dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2015 dengan jumlah 12 BUS. Sedangkan teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan metode *purposive sampling* dimana peneliti memberikan kriteria dalam penentuan sampel yang akan digunakan, yaitu:

1. Bank Umum Syariah yang memiliki *website* resmi yang aktif/dapat diakses dan tidak sedang dalam perbaikan.
2. Bank Umum Syariah yang melaksanakan IFR melalui *website* resminya. Bank yang dianggap melaksanakan IFR adalah perusahaan yang melaporkan informasi keuangan, laporan keuangan interim, dan/atau laporan tahunan melalui *website* perusahaan (Khan & Ismail, 2011).
3. Bank Umum Syariah yang telah berdiri lebih dari dua tahun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa keterangan/informasi keuangan dan nonkeuangan yang bersumber dari *website* resmi masing-masing BUS. Alamat *website* masing-masing BUS diambil dari statistik data alamat BUS oleh OJK dan melalui bantuan *search engine*.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara *scoring*. Pada teknik *scoring* ini tidak dibedakan bobot untuk setiap *item*

pengungkapan. Tahapan-tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Memberikan skor untuk setiap *item* variabel yang diungkapkan melalui *website* bank, jika suatu *item* diungkapkan, maka akan diberikan skor satu (1) dan jika tidak diungkapkan akan diberikan skor nol (0).
2. Skor yang diperoleh bank pada ketiga variabel dijumlahkan untuk mendapatkan total skor pengungkapan masing-masing bank.
3. Menghitung skor kelengkapan pengungkapan (IFR Indeks) dengan menggunakan metode perhitungan yang digunakan oleh Khan & Ismail (2011) yang cara perhitungannya sama seperti indeks pengungkapan pada umumnya (indeks wallace), yaitu dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan skor maksimal yang dapat diperoleh bank apabila mengungkapkan keseluruhan *item*.

$$\text{IFR Indeks} = \frac{\sum \text{skor yang diperoleh perusahaan}}{\sum \text{skor maksimal}}$$

Skor maksimal yang akan diperoleh perusahaan merupakan total *item* indikator dari ketiga variabel penelitian yang berjumlah 112 *item*. Dengan rumus perhitungan tersebut, maka semakin banyak *item* pengungkapan yang disajikan akan semakin tinggi pula skor IFR yang diperoleh.

4. Melakukan eksplorasi terhadap hasil penelitian sesuai dengan hasil yang dipaparkan pada penelitian terdahulu, lalu memberikan kesimpulan secara umum dari hasil penelitian.

4. PEMBAHASAN

Sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, terdapat tuntutan bagi Bank Umum Syariah untuk melakukan transparansi kegiatan usahanya kepada masyarakat umum seperti yang terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam rangka melakukan transparansi tersebut, BUS dapat menyajikan informasi keuangan maupun nonkeuangan melalui berbagai media salah satunya melalui *website* resmi perusahaan atau biasa disebut *Internet Financial Reporting (IFR)*. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilihat bagaimana luas pengungkapan informasi keuangan maupun nonkeuangan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dengan IFR.

Hasil perhitungan skor IFR keseluruhan variabel penelitian dari 11 BUS berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti selama bulan April 2016 tersaji pada grafik 1 dan lebih rinci pada tabel 3. Dari data tersebut diketahui bahwa skor yang diraih oleh masing-masing BUS memiliki nilai yang hampir setara. Tidak terdapat selisih skor yang signifikan di antara 11 bank yang dijadikan sampel penelitian.

Grafik 1. Skor IFR BUS Keseluruhan

Sumber: Data diolah, 2016

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dari hasil perhitungan skor IFR diraih oleh Bank BNI Syariah (BNIS) dengan skor sebesar 63% atau dengan jumlah pengungkapan sebanyak 70item. BNIS berhasil mengungguli Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Panin Syariah(PBS) yang saat ini statusnya telah menjadi perusahaan terbuka dan dituntut untuk lebih transparan dalam melaporkan kondisi perusahaan demi kepentingan para pemegang saham dalam mengambil keputusan investasi serta menarik perhatian calon investor. BMI bahkan menemani Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) menjadi dua bank dengan nilai terendah pada penelitian ini, yaitu sebesar 49% atau sebanyak 53 item pengungkapan. Untuk rincian hasil perolehan skor IFR pada masing-masing BUS sendiri akan disajikan dalam tabel 3 berikut.

Tabel 2. Hasil Perolehan Skor IFR Bank Umum Syariah

No	Kode Bank	Isi		Tampilan		Ketepatanwaktuan		Skor IFR	
		Item	%	Item	%	Item	%	Item	%
Total Item		81	100%	20	100%	11	100%	112	100%
1	BMI	44	54%	10	50%	1	9%	55	49%
2	BVS	49	60%	11	55%	2	18%	62	55%
3	BRIS	51	63%	13	65%	2	18%	66	59%
4	BJBS	43	53%	10	50%	2	18%	55	49%
5	BNIS	55	68%	13	65%	2	18%	70	63%
6	BSM	53	65%	14	70%	2	18%	69	62%

7	BSMI	46	57%	10	50%	2	18%	58	52%
8	PBS	52	64%	11	55%	1	9%	64	57%
9	BSB	49	60%	12	60%	2	18%	63	56%
10	BCAS	50	62%	10	50%	2	18%	62	55%
11	MSI	47	58%	10	50%	2	18%	59	53%
Rata-rata		49.00	60%	11.27	56%	1.82	17%	62.09	55%

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil perolehan skor IFR BUS berada pada rentang 49% - 63%. Hasil ini memang belum dapat dikategorikan sebagai hal yang memuaskan atau tidak karena belum ada ketentuan mengenai hal tersebut. Namun jika dilihat dari jumlah pengungkapan BUS yang telah menyajikan sebagian besar *item* pengujian ditambah dengan temuan-temuan lain yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya, dapat dikatakan bahwa informasi yang ungkapkan oleh BUS telah cukup memadai. Merujuk pada teori pengungkapan dalam prinsip dasar akuntansi, perusahaan memang dapat menyajikan kelengkapan informasi di luar pengungkapan wajib secara relevan agar mampu memberikan pengungkapan yang lebih luas mengenai kondisi yang terjadi dalam perusahaan atau yang biasa disebut dengan pengungkapan penuh (*full disclosure*). Namun, dalam pelaksanaannya perusahaan juga tetap harus memperhatikan batasan materialitas dan biaya seperti yang diatur dalam kerangka konseptual laporan keuangan syariah (KDPLKS).

Disamping itu, dari tabel 3 di atas diketahui rata-rata skor IFR yang diraih oleh BUS adalah sebesar 55% (62.09 *item*). Hasil ini merupakan kabar baik bagi industri perbankan syariah dimana mereka berhasil meraih skor IFR lebih dari 50% pada saat belum tersedia peraturan khusus di Indonesia mengenai tata cara penyajian informasi perusahaan melalui *website*. Pada saat ini, OJK sendiri masih berada pada tahap penyusunan konsep dan rancangan mengenai hal tersebut. Selain itu, rancangan peraturan tersebut belum mencakup industri perbankan syariah karena hanya ditujukan untuk mengatur situs web emiten atau perusahaan publik di Indonesia. Akan tetapi, BUS sangat terbantu dengan kehadiran Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang telah disebutkan sebelumnya.

Setelah mengetahui hasil perhitungan skor IFR secara umum yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka pada bagian ini akan dijelaskan mengenai penerapan IFR pada 11 BUS berdasarkan jenis variabel penelitian yang digunakan, yaitu variabel isi, variabel tampilan dan variabel ketepatanwaktuan. Hasil skor dari setiap bank tersebut kemudian akan dikelompokkan berdasarkan rentang nilainya seperti yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu (Khan & Ismail, 2011; Almilia, 2009).

Setelah mendapatkan hasil skor penilaian IFR pada seluruh BUS dan dilakukan analisis data pada masing-masing variabel penelitian. Maka

peneliti dapat memberikan peringkat kepada 11 BUS sesuai dengan skor IFR keseluruhan yang telah diperoleh. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 yang menerangkan urutan peringkat BUS dalam melaksanakan IFR mulai dari skor tertinggi hingga terendah.

Berdasarkan data pada tabel 4 tersebut, peringkat pertama skor IFR tertinggi pada BUS saat ini diraih oleh PT. Bank BNI Syariah dengan jumlah pengungkapan 70 *item* atau dengan skor IFR sebesar 63%. Urutan kedua dengan selisih 1 *item* pengungkapan ditempati oleh PT. Bank Syariah Mandiri dengan skor 62% dan diikuti oleh PT. Bank BRISyariah, PT. Bank Panin Syariah Tbk. dan PT. Bank Syariah Bukopin yang menempati urutan ke 3,4 dan 5. Sedangkan urutan terakhir diduduki bersama oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Jabar Banten Syariah dengan skor IFR 49%.

Tabel 3. Peringkat Skor IFR BUS di Indonesia

Peringkat	Nama Bank	Skor IFR	Jml <i>Item</i>
1	PT. Bank BNI Syariah	63%	70
2	PT. Bank Syariah Mandiri	62%	69
3	PT. Bank BRISyariah	59%	66
4	PT. Bank Panin Syariah Tbk.	57%	64
5	PT. Bank Syariah Bukopin	56%	63
6	PT. Bank Victoria Syariah PT. Bank BCA Syariah	55%	62
7	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	53%	59
8	PT. Bank Mega Syariah	52%	58
9	PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. PT. Bank Jabar Banten Syariah	49%	55

Sumber: Data diolah, 2016

Dengan adanya peringkat di atas, setiap bank dapat mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas kegiatan penyampaian informasi perusahaan baik keuangan dan nonkeuangan dalam *website* resmi yang dimilikinya atau yang biasa disebut dengan istilah *Internet Financial Reporting (IFR)*. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan ataupun mempertahankan kualitas yang telah diraihnya.

5. SIMPULAN

Kesebelas BUS yang dijadikan sampel penelitian sudah dapat melaksanakan *Internet Financial Reporting (IFR)* dan mencapai rata-rata skor IFR keseluruhan sebesar 55% (62,09 *item*) dengan distribusi skor IFR masing-masing BUS yang tidak jauh berbeda, yakni berkisar mulai dari 49% hingga 63%.

BUS di Indonesia pada saat ini sudah cukup luas mengungkapkan informasi yang dimilikinya. Hasil pengamatan pada variabel isi menyatakan bahwa 7 dari 11 bank sampel penelitian telah berhasil menyajikan *item*

pengungkapan dengan skor 60% - 69.9%, sedangkan 4 lainnya berada pada skor 50% - 59.9%.

Sebagian besar BUS yang kurang memanfaatkan kelebihan yang disediakan oleh *website* dalam mendukung tampilan informasi yang disajikan, seperti penggunaan format laporan yang interaktif. Sebagian besar BUS hanya menyajikan laporan publikasinya dengan format pdf yang notabene akan terlihat sama seperti laporan keuangan cetak. Namun hasil skor IFR untuk variabel tampilan menunjukkan bahwa kesebelas BUS telah menggunakan lebih dari 50% *item* indikator tampilan yang diujikan dengan nilai tertinggi yang mencapai 70% atau setara dengan 14 dari 20 *item* pengungkapan yang diujikan.

Hasil pengujian pada variabel ketepatanwaktuan memberikan hasil yang kurang memuaskan, karena nilai tertinggi BUS hanya mencapai skor 18% atau sebanyak 2 dari 11 *item* yang diujikan. Akan tetapi, pengujian ketepatanwaktuan publikasi laporan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 menunjukkan hasil yang baik, karena banyak BUS yang telah mempublikasikan laporannya secara tepat waktu berdasarkan ketentuan pada peraturan tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdelsalam, O., & El-Masry, A. (2008). The impact of board independence and ownership structure on the timeliness of corporate internet reporting of Irish-listed companies. *Managerial Finance*, 34(12), 907-918.
- Agboola, A. A., & Salawu, M. K. (2012). The Determinants of Internet Financial Reporting: Empirical Evidence from Nigeria. *The International Institute for Science, Technology and Education (IISTE)*, 3 (11)
- Allam, A., & Lymer, A. (2003). Developements in Internet Financial Reporting: Review and Analysis Across Five Developed Countries. *The International Journal of Digital Accounting Research*, 3 (6), 165-199.
- Almilia, L. S. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela "Internet Financial and Sustainability Reporting". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12 (12), 117-131.
- Almilia, L. S. (2009). Analisa Komparasi Indeks Internet Financial Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*., ISSN: 1907-5022, 31-32.
- Aly, D., Simon, J., & Hussainey, K. (2010). Determinants of Corporate Internet Reporting: Evidence from Egypt. *Managerial Auditing Journal*, 25 (2), 182-202.

- Bank Indonesia. (2007). Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. (2008). Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: BI.
- Chan, W. K., & Wickramasinghe, N. (2006). Using the internet for financial disclosures: the Australian experience. *International Journal of Electronic Finance*, 1(1), 118-150.
- Elhelaly, M., & Mohamed, E. K. (2014). A Survey of Internet Financial Reporting in Egypt. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(1), 70.
- FASB. (2000). Business Reporting Research Project: Electronic Distribution of Business Reporting Information. Steering Committee Report Series, 1.
- Haniffa, M. H., & Rashid, H. M. A. (2005). The Determinants of Voluntary Disclosures in Malaysia: The Case of Internet Financial Reporting. *UNITAR e-Journal*, 2(1), 22-42.
- Hardiningsih, P. (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi voluntary disclosure laporan tahunan perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 15(1), 67-79.
- IASC. (1999). Business Reporting on the Internet. International Accounting Standards Committee, 48.
- Jensen, M. (2001). Value maximisation, stakeholder theory, and the corporate objective function. *European financial management*, 7(3), 297-317.
- Khan, M. N. A. A., & Ismail, N. A. (2011). The level of internet financial reporting of Malaysian companies. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 2, 27-39.
- Khan, D. M., & Ismail, P. D. (2011). The Use of Disclosure Indices in Internet Financial Reporting Research. *Journal of Global Business and Economics*, 3 (1).
- Khan, M. N. A. A., & Ismail, N. A. (2012). Users' Perceptions of Various Aspects of Malaysian Internet Financial Reporting. *Journal of Organizational Management Studies*, 2012, 1.

- Lai, S.-C., Lin, C., Li, H.-C., & Wu, F. H. (2010). An Empirical Study of the Impact of Internet Financial Reporting on Stock Prices. *The International Journal of Digital Accounting Research*, 10, 1-26.
- Lestari, N. (2014). Analisis Jumlah Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Tahunan Perbankan Syariah melalui Website. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lipunga, A. M. (2014). Internet Financial Reporting in Malawi. *International Journal of Business and Management*, 9 (6).
- Mooduto, W. I. S. (2013). Reaksi Investor atas Pengungkapan Internet Financial Reporting. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 479-492.
- Narsa, I. M., & Pratiwi, F. F. (2017). Internet financial reporting, pengungkapan informasi website, luas lingkup pelaporan internet, dan nilai perusahaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 18(2), 259-273.
- Ojah, K., & Mokoaleli-Mokoteli, T. (2012). Internet financial reporting, infrastructures and corporate governance: An international analysis. *Review of Development Finance*, 2(2), 69-83.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia . p. 41.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. (Juni 2015). Statistik Perbankan Syariah.
- Pertiwi, A. D., & Hermana, B. (2015). Comparing Internet Financial Reporting Index Between Bank and Non Bank in Indonesia. *The Journal of Internet Banking and Commerce*, 18 (2).
- Pervan, I. (2006). Voluntary financial reporting on the internet: analysis of the practice of stock-market listed croatian and slovene joint stock companies. *Financial theory and practice*, 30(1), 1-27.
- Purba, L., Medyawati, H., Silfianti, W., & Hermana, B. Internet Financial Reporting Index Analysis: An Overview from the State Owned Enterprises in Indonesia. *Journal of Economics, Business and Management*, 1 (3).
- Sari, R. C., & Zuhrotun. (2006). Keinformatifan Laba di Pasar Obligasi dan Saham: Uji Liquidation Option Hypothesis. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, K-AKPM 08.

- Shehata, N. F. (2014). Theories and Determinants of Voluntary Disclosure. *Accounting and Finance Research*, 3 (1).
- Suripto, B. (2006). Praktik Pelaporan Keuangan dalam Website Perusahaan Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, XVII (1), 41-56.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Widaryanti. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Corporate Internet Reporting pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 2 (2).